

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI PULAU LOMBOK

(Perception and Participation of Local Community in Rinjani Mountain National Park (RMNP) Preservation in Lombok Island)

L. Sukardi, Dudung Darusman, Leti Sundawati, Hardjanto

ABSTRACT

The general goal of this research is to define perception and participation of local community in Rinjani Mountain National Park (RMNP) preservation. This research was conducted in five resorts of RMNP, those are Senaru, Santong, Stiling, Aikmel, and Sembalun resort. Data were analyzed descriptively, scoring (lickert scale), spearman correlation, and Contingen Valuation Methods (CVM). The result of this research showed that the communities perception is grouped into medium category. The community realized the function of RMNP is to protect them from flood, eroded, storm. They also knew that forest resources of RMNP has a high economic value. However, the economic pressure forced the communities to exploit the forest (including timber). On the other hand, the communities participatory on RMNP managment is low. Communities involvement in RMNP prservation need economic insentive and has positif relation to household income.

Key words : perception, participatory, management

I. PENDAHULUAN

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) merupakan salah satu kawasan konservasi yang ditetapkan dengan tujuan utama mempertahankan siklus hidrologi dan iklim mikro Pulau Lombok (mengingat 90% sungai di Pulau Lombok berhulu di TNGR), mempertahankan sumber plasma nutfah serta habitat berbagai jenis flora dan fauna tropika yang beberapa diantaranya termasuk golongan endemik (FAO 1981; Dinas Kehutanan NTB 1997). Dilihat dari tujuan penetapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa TNGR mempunyai peranan vital bagi sistem ekologis Pulau Lombok. Kerusakan atau degradasi kawasan TNGR akan berdampak negatif pada sistem ekologi Pulau Lombok dan selanjutnya akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat ke arah negatif.

Keberadaan TNGR selain memberikan manfaat fisik (hidrologis, stabilisasi iklim, habitat vegetasi dan satwa maupun mempertahankan siklus/degradasi hara tanah), juga memiliki potensi yang penting ditinjau dari sisi sosial ekonomi budaya masyarakat (kayu, padang penggembalaan, lahan pertanian, tanaman buah, aset pariwisata alam dan pendidikan). Namun demikian dalam pengelolaan saat ini masih dijumpai beberapa permasalahan pokok yang merupakan potensi konflik (Abas 2005).

Dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Rinjani Tahun 1998–2023 dinyatakan bahwa isu konflik dalam pengelolaan kawasan TNGR terdiri atas permasalahan kawasan yakni perambahan hutan, pencurian kayu, perburuan liar, penggembalaan ternak maupun tumpang tindih kawasan untuk kepentingan lain (jalan raya) dan permasalahan pengelolaan yang terdiri dari masalah institusional, sumberdaya manusia, sarana/prasarana, database yang minim, pendanaan maupun masalah teknis lainnya (Dinas Kehutanan Dati I NTB 1997).

Persoalan yang dihadapi dalam perkembangan selanjutnya seringkali keberadaan dan manfaat hutan (termasuk TNGR) direduksi nilainya hanya dalam perspektif ekonomi. Nilai ekosistem hutan yang beragam telah banyak mengalami pengabaian sehingga apresiasi nilainya hanya diukur dari potensi kayu (*timber*). Sementara potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang sangat besar dalam menunjang sistem kehidupan masyarakat cenderung diabaikan. Perannya sebagai penyangga keberlanjutan ekosistem dalam bentuk pengatur tata air kini sangat dirasakan tatkala lingkungan mengalami disfungsi ekosistem dengan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di musim hujan serta bencana kekeringan di musim kemarau. Kearifan nenek moyang beserta seluruh generasi pendahulu dalam memandang hutan dan lingkungannya seyogyanya dapat diwariskan kepada segenap generasi penerus agar sumber daya hutan beserta seluruh fungsinya dapat terjaga keberlanjutannya.

Bagi masyarakat pedesaan, hutan yang ada di sekitarnya tidak penting jika ia tidak dapat memperoleh manfaat dari padanya. Keberadaan

hutan mungkin melimpah, tetapi jika orang lain yang memanfaatkannya, maka justru menjadi sumber bencana. Persepsi masyarakat lokal terhadap lingkungannya (ekosistem hutan) tidak bersifat sekuler, tetapi hutan dianggap bagian yang terintegrasi dari kehidupan mereka. Dengan persepsi tersebut, maka berbagai masyarakat lokal pada umumnya memiliki kearifan ekologis dalam mengelola lingkungan, seperti ekosistem hutan. Pengelolaan hutan oleh berbagai kelompok masyarakat lokal di Indonesia telah memberikan hasil cukup baik dan sejalan dengan konsep-konsep modern dari Barat (Iskandar 1998).

Dengan demikian keberadaan masyarakat merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam kerangka perlindungan dan pemanfaatan hutan. Selama ini keterlibatan masyarakat lokal dalam perlindungan dan pelestarian hutan dilakukan melalui pengelolaan hutan adat oleh lembaga-lembaga adat dengan berbagai bentuk kearifan lokal. Salah satu bentuk kelembagaan lokal di Kawasan Hutan Rinjani yang eksis dalam pengelolaan hutan adalah Lembaga Adat Bayan. Dalam hubungannya dengan hutan, Lembaga Adat Bayan telah menciptakan aturan-aturan tertentu (bahasa setempat "awig-awig") mengenai pola hubungan masyarakat dengan hutan. Bentuk aturan tersebut antara lain berupa larangan melakukan eksploitasi hutan bagi kepentingan pribadi, pembakaran, perburuan satwa, menggembalakan ternak, perbuatan amoral, mencemari sumber air dan lain-lain perbuatan yang merugikan kepentingan bersama di areal hutan adat. Penegakan sanksi adat dalam hal ini sangat ketat dan didukung oleh kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat. Fungsi vital hutan sebagai sumber mata air utama juga sangat disadari oleh warga masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pengkajian secara cermat dan komprehensif mengenai "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)". Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menelaah persepsi masyarakat terhadap keberadaan Hutan Rinjani (TNGR), (2) menganalisis penilaian ekonomi masyarakat terhadap sumberdaya hutan, dan (3) mengkaji kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian TNGR.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Pulau Lombok dengan memilih 5 (lima) resort sebagai lokasi penelitian, yaitu: Resort Santong, Senaru, Sembalun, Aikmel, dan Stiling. Pemilihan resort didasarkan pada pertimbangan kompleksitas persoalan yang dihadapi (tingkat kerawanan gangguan). Aspek utama yang menjadi fokus perhatian adalah interaksi masyarakat dengan TNGR serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dan informasi objektif sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan pendekatan/teknik survei, yaitu wawancara (*interview*) dengan 30 rumahtangga contoh pada setiap lokasi penelitian yang ditentukan secara *random sampling*. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci (*key informan*) pada setiap lokasi penelitian.

Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh, selain dianalisis secara deskriptif, juga dilakukan analisis korelasi spearman, skoring (skala likert), dan *Contingen Valuation Methods (CVM)* yang meliputi: keinginan membayar (*willingness to pay* atau WTP) masyarakat terhadap perbaikan kualitas hutan, dan keinginan menerima (*willingness to accept* atau WTA) dari kerusakan hutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sudah tersosialisasi secara meluas di kalangan masyarakat sekitar, terbukti dari hampir seluruh responden (92,67%) mengetahui keberadaan TNGR. Selama ini manfaat TNGR yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah fungsinya sebagai sumber mata air. Di beberapa tempat masyarakat mulai merasakan adanya kelangkaan air pada waktu-waktu tertentu sehingga berpengaruh terhadap produktivitas tanamannya. Bahkan peningkatan degradasi hutan yang berdampak pada penurunan debit air dan hilangnya titik-titik mata air tersebut menyebabkan terjadinya sengketa distribusi air, baik yang melibatkan warga dengan warga dalam satu desa, warga desa satu dengan warga desa lainnya maupun antara warga dengan pengusaha dan pemerintah.

Manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat adalah fungsi TNGR sebagai pencegah banjir dan longsor bahkan sebagai tempat mencari nafkah.

Karena fungsinya ini, maka masyarakat merasa keberadaan TNGR sangat penting dan perlu dilestarikan, sebagaimana diakui oleh 96,67% responden.

3.1 Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Hutan Rinjani (TNGR)

Rakhmat (2005), mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan perkataan lain persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*) dimana setiap orang atau masyarakat akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda tergantung pada stimuli inderawi masing-masing.

Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pesan dan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan TNGR. Penilaian masyarakat tentang keberadaan TNGR diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat yang secara garis besar dipilahkan menjadi 2 (dua) aspek. Pertama, manfaat penggunaan (*use value*) terdiri atas 3 (tiga) obyek persepsi, yaitu: (1) manfaat langsung (*direct use value*) meliputi 5 butir persepsi, (2) manfaat tidak langsung atau manfaat fungsional (*indirect use value*) meliputi 3 butir persepsi, dan (3) manfaat pilihan (*option value*) meliputi 2 butir persepsi. Kedua, manfaat bukan penggunaan (*non use value*) terdiri atas 2 obyek persepsi, yaitu (1) manfaat keberadaan (*existence value*) meliputi 2 butir persepsi, dan (2) manfaat lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat, dilakukan klasifikasi skor penilaian menggunakan skala likert (Padmowihardjo 1996; Meuller 1996). Dalam hal ini tingkat persepsi masyarakat dipilahkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi (Tabel 1).

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Persepsinya terhadap Keberadaan TNGR

No Uraian	Tingkat Persepsi					
	Rendah		Sedang		Tinggi	
	Jlh	Persen	Jlh	Persen	Jlh	Persen
A. Manfaat Penggunaan (<i>use value</i>)						
1. Manfaat Langsung	67	44,67	66	44,00	17	11,33
2. Manfaat Fungsional	10	6,67	31	20,67	109	72,67
3. Manfaat Pilihan	95	63,33	50	33,33	5	3,33
Agregat (A)	28	18,67	110	73,33	12	8,00
B. Manfaat Bukan Penggunaan (<i>Non Use Value</i>)						
1. Manfaat Keberadaan	27	18,00	61	40,67	62	41,33
2. Manfaat lainnya	47	31,33	93	62,00	10	6,67
Agregat (B)	23	15,33	68	45,33	59	39,33
Agregat (A) dan (B)	28	18,67	111	74,00	11	7,33

Berdasarkan distribusi skor penilaian seperti pada Tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap TNGR baik manfaat penggunaan maupun manfaat bukan penggunaan, termasuk dalam kategori "sedang", tercermin dari modus penilaian berada pada kategori ini. Meski demikian, secara parsial persepsi terhadap manfaat fungsional dan manfaat keberadaan termasuk kategori "tinggi". Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat tidak langsung (manfaat fungsional) dari keberadaan TNGR sebagai pencegah banjir, longsor, dan pelindung dari badai. Banjir bandang dan longsor yang berulang kali terjadi beberapa tahun yang lalu memberikan pelajaran berharga dan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan (termasuk TNGR).

Menurut Rakhmat (2005), secara garis besar persepsi seseorang terhadap sesuatu objek dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu faktor personal (fungsional) dan faktor situasional (struktural). Faktor personal berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk faktor personal. Dalam hal ini yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu. Adapun persepsi yang dipengaruhi oleh faktor situasional (struktural) semata-mata berasal dari sifat stimuli fisik. Berkenaan dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan TNGR, sebagai akibat dari beragamnya karakteristik, pengalaman, dan kepentingan masing-masing, maka persepsi masyarakat terhadap keberadaan TNGR sangat beragam, dipengaruhi oleh:

- 1) Keterikatan emosional / historis dengan TNGR
Keterkaitan emosional/historis masyarakat terbentuk sebagai akibat dari keberadaan mereka secara turun temurun di kawasan hutan TNGR. Bagi mereka yang sejak kecil atau bahkan dilahirkan di kawasan ini telah secara fisik dan non fisik beasosiasi dan menyatu dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama berdomisili di sekitar kawasan TNGR adalah 23,27 tahun; suatu rentang waktu yang cukup lama, bahkan banyak diantaranya yang dilahirkan ditempat ini. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap persepsinya akan keberadaan TNGR.
- 2) Ketergantungan dengan TNGR
Ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan TNGR tidak hanya karena kawasan ini sebagai sumber penghidupan bagi mereka, akan tetapi juga karena faktor-faktor lainnya. Tinggi rendahnya rasa ketergantungan ini akan sangat berpengaruh terhadap persepsi dan penilaiannya terhadap keberadaan TNGR. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok menggantungkan pemenuhan kebutuhan air minum dan air irigasi serta berbagai kebutuhan lainnya dari kawasan Rinjani.
- 3) Kepercayaan/keyakinan
Kepercayaan/keyakinan masyarakat akan eksistensi TNGR ada kaitannya dengan adat-budaya dan mitos-mitos yang diyakini dan dipelihara secara turun temurun. Keyakinan ini seringkali sifatnya supranatural yang sulit dibuktikan kebenarannya dan biasanya dipercaya/diyakini secara kolektif oleh sekelompok masyarakat yang berdomisili di kawasan tertentu (dalam hal ini kawasan TNGR). Sebagian masyarakat Pulau Lombok masih ada yang mempercayai bahwa di kawasan Hutan Rinjani bersemayam makhluk halus (jin) yang dipimpin oleh seorang ratu bernama "Dewi Anjani". Makhluk halus inilah yang diyakini menjaga Gunung Rinjani agar tidak menimbulkan malapetaka bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat di Pulau Lombok pada umumnya.
- 4) Pengetahuan
Tinggi rendahnya pengetahuan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap rasionalitas dalam penilaian dan persepsinya terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan yang dimaksudkan bukan semata-mata dilihat dari jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh, melainkan yang lebih berpengaruh justru pengetahuan mereka akan keberadaan TNGR. Tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan TNGR masih relatif rendah, ditunjukkan oleh 33,33% responden tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali dan 50% pernah mengenyam pendidikan sampai setingkat SD.
- 5) Manfaat yang dirasakan
Manfaat yang diperoleh dari keberadaan TNGR dapat berupa materi dan non materi, berbeda/bervariasi antara seseorang dengan yang lainnya. Dengan demikian persepsinya akan keberadaan TNGR sangat ditentukan oleh manfaat yang dirasakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 40% responden mengaku bahwa salah satu sumber penghasilan keluarga adalah dari kawasan TNGR. Kelompok masyarakat ini menilai manfaat keberadaan TNGR lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Lingkar Rinjani ini seiring dengan hasil penelitian Liswanti *et al.* (2004) di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur yang menyimpulkan bahwa masyarakat Dayak Merap dan Punan menilai pentingnya hutan primer didasarkan pada pertimbangan: (1) hutan sebagai sumber mata pencaharian baik langsung maupun tidak langsung, (2) adanya nilai-nilai historis yang harus terus dipertahankan secara turun-temurun, dan (3) memiliki kelimpahan sumberdaya yang sangat bernilai seperti tumbuhan dan hewan.

3.2 Penilaian Ekonomi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hutan

Secara teoritis, nilai ekonomi sumberdaya alam dibedakan antara nilai atas dasar penggunaan (*use value*) dan nilai bukan penggunaan (*non-use value*). Atas dasar penggunaannya, nilai itu dibedakan lagi menjadi nilai atas dasar penggunaan langsung (*direct use value*), nilai penggunaan tidak langsung (*indirect use value*), dan nilai pilihan penggunaan (*option use value*). Sementara itu nilai bukan penggunaan, dibedakan menjadi nilai pilihan non penggunaan (*option non use value*), nilai keberadaan (*existence value*), dan nilai non guna lainnya (Pearce *et al.* 1990; Suparmoko 2006; Nurrochmat 2006)

Berkenaan dengan TNGR, masyarakat sepakat untuk memberikan nilai ekonomi terhadap keberadaan TNGR, baik nilai penggunaan maupun nilai bukan penggunaan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan masyarakat akan pentingnya penilaian ekonomi kawasan TNGR diajukan 10 (sepuluh) pertanyaan seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tanggapan Responden terhadap Pentingnya Penilaian Ekonomi TNGR

No	Uraian	Pentingnya Penilaian Ekonomi					
		Ya	Persen	Tidak	Persen	Ragu	Persen
1	Hasil hutan yang diambil	131	87,33	9	6,00	10	35
2	Sebagai sumber mata air	139	92,67	0	0,00	11	30
3	Sebagai habitat berbagai jenis tumbuhan	135	90,00	0	0,00	15	22
4	Sebagai habitat berbagai jenis hewan & burung	134	89,33	1	0,67	15	21
5	Sebagai pencegah banjir	133	88,67	0	0,00	16	24
6	Sebagai pencegah longsor	133	88,67	1	0,67	16	23
7	Perlindungan terhadap angin	133	88,67	1	0,67	16	21
8	Keindahan/Pemandangan	134	89,33	2	1,33	14	21
9	Tempat pelaksanaan upacara adat/ritual	133	88,67	1	0,67	16	13
10	Tempat Rekreasi	130	86,67	1	0,67	19	13

Tanggapan masyarakat atas pentingnya penilaian ekonomi TNGR mengisyaratkan bahwa masyarakat telah memiliki kepedulian yang cukup tinggi akan kelestarian TNGR. Hal ini dicerminkan oleh tingginya persentase responden (>80%) yang menganggap perlunya penilaian ekonomi TNGR, baik nilai penggunaan maupun nilai bukan penggunaan. Bagi mereka yang menganggap tidak perlu dinilai secara ekonomi, selain karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pelestarian hutan, masih ada juga sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwa hutan, air, dan sumberdaya alam lainnya adalah anugerah Tuhan untuk ummat-Nya sehingga tidak boleh dinilai dan diperjualbelikan.

Ironisnya, meskipun hampir keseluruhan responden memandang perlu untuk memberikan nilai terhadap berbagai fungsi TNGR, namun dalam kenyataannya hanyalah nilai kegunaan langsung (*direct use value*) yang diperhitungkan, yaitu nilai hasil hutan yang diambil dan besar kecilnya nilai hasil hutan yang diambil tergantung dari harga jual yang biasanya ditentukan oleh pembeli (pedagang pengumpul). Bahkan kerusakan tanaman di sekitar lokasi penebangan (*on site effect*) juga tidak diperhitungkan.

Menurut Fauzi (2006), nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut keinginan membayar (*willingness to pay = WTP*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bisa "diterjemahkan" ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa.

Sisi lain dari pengukuran nilai ekonomi dapat juga dilakukan melalui pengukuran *willingness to accept (WTA)* yang tidak lain adalah jumlah - minimum pendapatan seseorang untuk mau menerima penurunan - sesuatu. Dalam praktek pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan daripada WTA, karena WTA bukan pengukuran yang berdasarkan insentif (*insentive based*) sehingga kurang tepat untuk dijadikan studi yang berbasis perilaku manusia (*behavioural model*). Mengenai kesediaan masyarakat di kawasan TNGR untuk membayar (WTP) dan kesediaan menerima (WTA) kualitas lingkungan dilustrasikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan WTP dan WTA di Kawasan TNGR

No	Uraian	WTP	WTA
1.	Jumlah responden (orang)	150	150
2.	Kesediaan responden:		

a. Bersedia	28 (18,67%)	57 (38,00%)
b. Ragu-ragu	6 (4,00%)	6 (4,00%)
c. Bersyarat	4 (2,67%)	-
d. Tidak bersedia	112 (74,67%)	87 (58,00%)
3. Nilai Kesiediaan (Rp):		
a. Rata-rata keseluruhan responden	4.197,-	56.500,-
b. Rata-rata dari yang bersedia (28 org)	22.482,-	1.385.526,-
c. Nilai Minimum	1.000,-	25.000,-
d. Nilai Maksimum	200.000,-	10.000.000,-

Kecilnya proporsi masyarakat yang memiliki kesanggupan untuk membayar kualitas lingkungan (WTP) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 di atas mencerminkan masih rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan (hutan). Kenyataan ini tidak seiring dengan pernyataan perlunya memberikan nilai ekonomi terhadap berbagai fungsi TNGR. Berdasarkan fenomena ini maka dapat disimpulkan bahwa penilaian ekonomi secara total terhadap TNGR masih sebatas persepsi; belum diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan riil.

Selain proporsinya kecil, kesanggupan untuk membayar (WTP) relatif kecil, yaitu bervariasi mulai dari Rp 1 000,- hingga Rp 200 000,-. Bahkan, dari 28 orang yang menyatakan kesiediaan untuk membayar (WTP), 11 orang (39,29%) diantaranya hanya bersedia membayar Rp 1 000,- dan hanya 1 orang (3,57%) yang bersedia membayar Rp 200 000,-. Hasil penelitian WWF Program Nusa Tenggara juga mengidentifikasi kesiapan/kesanggupan setiap rumah tangga untuk membayar kualitas lingkungan (WTP) sebesar Rp 1 000,- per bulan. Besar kecilnya nilai WTP ini diduga ada hubungannya dengan kesadaran, persepsi, dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Berbeda dengan WTP, jumlah responden yang menginginkan kompensasi (WTA) mencapai 2 kali WTP, yaitu sebanyak 57 orang (38%). Begitu pula dengan besarnya nilai WTA yang diharapkan sangat jauh melampaui nilai WTP. Berbagai alasan dikemukakan bagi mereka yang menginginkan kompensasi, antara lain untuk modal usaha, mencukupi kebutuhan keluarga, dan untuk biaya konservasi.

Perbedaan nilai WTP dan WTA yang sangat mencolok ini dari segi ekonomi mengindikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNGR masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan 61 orang (40,67%) responden yang menginginkan kompensasi itu diserahkan kepada masyarakat di sekitar kawasan TNGR secara perorangan. Fenomena ini mencerminkan sikap dasar masyarakat yang selalu ingin memanfaatkan peluang yang dapat menguntungkan. Ketika diminta untuk membayar, mereka memilih yang paling kecil, dan sebaliknya ketika diberi peluang untuk menerima, mereka menginginkan yang paling besar (maksimal).

3.3 Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian TNGR

Stuart (1993) mengatakan bahwa partisipasi adalah salah satu faktor sosial yang terbukti telah mensukseskan program-program pengembangan pedesaan. Di Kawasan Lingkar Rinjani pada umumnya masyarakat merasa bersalah melakukan penebangan kayu di hutan (termasuk TNGR), sebagaimana diakui oleh 112 orang (74,67%) dari 150 orang responden yang diwawancarai. Mereka menyadari kalau menebang pohon secara sembarang di hutan akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan serta akan berdampak cukup besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Selain kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, perasaan bersalah juga kepada generasi mendatang. Kesadaran ini merupakan modal sosial yang bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNGR.

Secara umum masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap TNGR, dibuktikan adanya keinginan bahwa TNGR seharusnya dijaga, dikelola dan dimanfaatkan. Hasil survei dan FGD menegaskan bahwa tidak ada masyarakat yang berpandangan dan berharap untuk memiliki hutan (TNGR). Namun demikian, ketika ada program yang melibatkan orang luar (seperti HKM), masyarakat setempat merasa keberatan dan menganggap dirinya lebih berhak; jika tidak terlibat mereka akan merusak kawasan hutan lainnya (pengalaman di Aik Berik dan Pesugulan). Berdasarkan fenomena ini maka terjadi "paradoks" dalam masyarakat kawasan TNGR, disatu sisi mereka tidak merasa memiliki hutan tetapi di pihak lain seolah-olah mengklaim bahwa hutan miliknya sehingga merasa lebih berhak atas pengelolaannya dan sangat tidak setuju jika ada orang luar yang ikut mengelola dan memanfaatkan hutan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan semakin meningkat terutama dengan adanya kejadian-kejadian bencana alam di berbagai daerah sebagai akibat kerusakan hutan (seperti banjir bandang dan longsor), baik yang disaksikan melalui media maupun yang terjadi langsung di Pulau Lombok. Jadi dengan globalisasi informasi, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melestarikan hutan. Indikasi ini antara lain tercermin dari adanya inisiatif salah seorang tokoh masyarakat adat Sembalun Bumbung (H. PURNIPA) untuk mengajak warganya menanam pohon, mulai dari lingkungan tempat tinggal hingga ke wilayah lainnya.

Meskipun kesadaran meningkat, namun secara umum partisipasi murni masyarakat untuk mengembangkan tanaman keras (kayu) pada lahan milik umum (mis TNGR) belum banyak dilakukan, kecuali pada lahan (kebun) milik pribadi dilakukan dengan penuh kesadaran. Lebih lanjut hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNGR saat ini masih termasuk kategori “rendah”, dilihat dari pencapaian skor yang diperoleh. Dalam penilaian ini partisipasi dipilahkan menjadi 2 (dua), yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung meliputi 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu partisipasi dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengamanan. Dari ketiga komponen penilaian ini, partisipasi masyarakat masih tergolong kategori “rendah”, ditunjukkan oleh modus skor yang terekonsentrasi pada kategori ini. Sementara itu untuk partisipasi tidak langsung, meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketaatan terhadap awig-awig; termasuk dalam kategori “sedang”.

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Partisipasinya dalam Pengelolaan TNGR

No	Uraian	Tingkat Partisipasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1.	Partisipasi Langsung	104	42	4
2.	Partisipasi tidak Langsung	54	91	5
	Agregat	91	56	3

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNGR ini seiring dengan hasil penelitian P3P Unram (2004) yang dilakukan di kawasan Hutan Rinjani. Ditemukan bahwa walaupun ada kesamaan persepsi tentang pentingnya “menjaga hutan”, namun ada distorsi antara persepsi/sikap dengan tindakan yang terlihat dari rendahnya kekompakan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga atau memelihara hutan. Disamping itu tidak ditemukan adanya kegiatan bersama yang dilakukan masyarakat (seperti gotong royong) dalam ikut menjaga hutan. Bahkan sebaliknya sesuai dengan temuan di atas, sebagian masyarakat justru memanfaatkan hutan sebagai sumber kayu bahan bangunan dan adanya perilaku pencurian terhadap kayu hutan. Temuan lainnya adalah penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kasus yang cukup kompleks dan rumit karena melibatkan tidak saja masyarakat di sekitar kawasan, tetapi juga para pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil hutan. Karena itu diperlukan kesadaran dan partisipasi semua pihak untuk menjaga dan melestarikan hutan; tidak hanya masyarakat di kawasan hutan, melainkan juga aparat. Peraturan perundangan harus betul-betul ditegakkan; setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pilih kasih sehingga akan menimbulkan efek jera.

Guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, maka pengelolaan TNGR harus dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif nyata antara pendapatan dengan partisipasi dalam pengelolaan, ditunjukkan nilai koefisien korelasi spearman sebesar 0,426 (Nyata pada $\alpha = 1\%$).

III. SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan TNGR termasuk dalam kategori “**sedang**”. Meski demikian secara parsial persepsi terhadap manfaat fungsional dan manfaat keberadaan termasuk kategori “**tinggi**”. Masyarakat menyadari sepenuhnya manfaat fungsional TNGR sebagai pencegah banjir, longsor, dan badai; serta memiliki penilaian ekonomi relatif tinggi terhadap sumberdaya hutan. Namun adanya

- tekanan/desakan kebutuhan ekonomi keluarga mendorong dilakukannya eksploitasi hasil hutan (terutama kayu).
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNGR termasuk kategori “rendah” dan memiliki hubungan positif dengan pendapatan rumahtangga. Artinya, semakin tinggi pendapatan (kesejahteraan ekonomi), maka semakin besar kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian TNGR. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan masih membutuhkan pamrih ekonomi, tercermin dari kecilnya proporsi masyarakat yang memiliki kesanggupan untuk membayar kualitas lingkungan (WTP), yaitu 18,67%.
 3. Manfaat langsung TNGR yang paling dirasakan masyarakat adalah sebagai sumber air, baik untuk keperluan domestik, pertanian maupun keperluan lainnya. Di sisi lain, masyarakat tidak menjadikan kawasan TNGR sebagai tumpuan utama sumber penghasilan keluarga, melainkan merupakan pilihan alternatif terakhir karena tidak ada sumber lain. Masyarakat lebih mementingkan kelestarian TNGR sebagai sumber mata air dibandingkan manfaat sebagai sumber ekonomi.

3.2. Saran

1. Dalam pengelolaan TNGR perlu memanfaatkan secara optimal modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal berupa tatanilai dan kearifan lingkungan.
2. Untuk menjaga kelestarian TNGR ke depan, maka pemberdayaan masyarakat secara sosial, ekonom dan budaya merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas R. 2005. Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Arief S. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta: UI-Press.
- Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. 2006. Data Dasar Sumberdaya Alam Taman Nasional Gunung Rinjani. Mataram: Balai TNGR.
- Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. 2007. Laporan Daftar Daerah Rawan Gangguan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Balai TNGR. Mataram: Balai TNGR.
- Badan Pusat Statistik NTB. 2006. Kecamatan Dalam Angka 2006. Mataram: BPS NTB.
- Carson RT, Flores N, Meade NF. 2000. Contingent Valuation: Kontroversi dan Bukti. Departement of Economics University of California. San Diego Notional Oceanic and Atmospheric Administration, US. Departement of Commerce.
- Colin P. 2000. Valuation of Unpriced Products: Contingent Valuation, Cost-Benefit Analysis and Participatory Democracy. Land Use Policy 17 (2000) 187-196. Bangor: School of Agricultural and Forest Sciences, University of Wales.
- Dephut RI, UNESCO, CIFOR. 2004. Buku Panduan 41 Taman Nasional di Indonesia. Bogor: Departemen Kehutanan, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization dan Center for International Forestry Research.
- Dephut RI. 2006. Master Plan Pengembangan Pariwisata Alam di Taman Nasional Gunung Rinjani. Bogor: PT. Sarbi Moerhani Lestari.
- Dinas Kehutanan Dati I NTB. 1997. Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Rinjani 1998–2003 (Buku I, II dan III). Mataram: Dinas Kehutanan Provinsi Dati I NTB.
- FAO. 1981. Feasibility Study of the Rinjani Complex Lombok. Field Report of Project National Park Development. Jakarta: Food and Agricultural Organization - UNDP.
- Fauzi A. 2006. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaspersz V. 1992. Teknik Analisis Dalam Penelitian Percobaan. Edisi Pertama. Bandung: Tarsito.
- Iskandar J. 1998. Swidden Cultivation As A Form Of Cultural Identity: The Baduy Case. [Dissertation]. University Of Kent At Canterbury.
- Liswanti N, Indrawan A, Sumardjo, Sheil D. 2004. Persepsi Masyarakat Dayak Merap dan Punan tentang Pentingnya Hutan di Lansekap Hutan Tropis, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Volume X No. 2. Juli - Desember 2006.
- Meuller DJ. 1996. Mengukur Sikap Sosial: Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi. Kartawidjaja ES, penerjemah; Jakarta: Bumi Aksara.

- Terjemahan dari: Measuring a Social Attitudes: A Handbook for Researchers and Practitioners.
- Nurrochmat DR. 2006. Dasar-Dasar Valuasi Ekonomi. Bahan Pelatihan Penyusunan PDRB Hijau Departemen Kehutanan. Bogor: Lab. Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan IPB.
- Parera E, Darusman D, Simangunsong B. 2006. Nilai Ekonomi Total Hutan Kayu Putih: Kasus di Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Volume XII No. 1. Januari - April 2006.
- Siegel S. 1990. statistic Nonparametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Sayuti Z dan Simatupang L, penerjemah. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama. Terjemahan dari: nonparametric Statistics.
- Singarimbun M, Effendi S. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Stuart TH. 1993. Participation for Empowerment and Sustainability: How Development Support Communication (DSC) Spels the Difference. Philippines: University of the Philippines Los Banos.
- Suparmoko. 2006. Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Wrihatnolo RR, Dwidjowijoto RN. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Wulandari C. 2005. Tingkatan Penerimaan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan dalam Mengatasi Agroforestri di Lahan Pekarangan. Jurnal Hutan Rakyat. Vol VII No. 1 Tahun 2005.